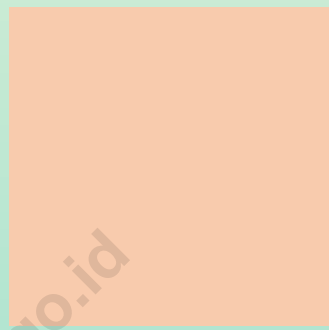


STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN KOLAKA UTARA 2022



<https://kolutkab.bps.go.id>



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN KABUPATEN KOLAKA UTARA 2022



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
KABUPATEN KOLAKA UTARA
2022

ISSN/ISBN:-

No. Publikasi: 74080.2228

Katalog: 4601001.7408

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: x + 24 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara

Penerbit:

©BPS Kabupaten Kolaka Utara

Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan Sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 dapat diselesaikan. Data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini adalah data hasil Survei Politik dan Keamanan tahun 2022.

Publikasi ini menyajikan beberapa informasi dalam bentuk tabel dan ulasan singkat, dengan maksud agar dapat memberikan gambaran tentang keadaan politik dan keamanan di Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara. Sebagai data pembandingan dan untuk melihat perkembangan keadaan politik dan keamanan, disajikan pula beberapa data hasil Survei Politik dan Keamanan tahun sebelumnya.

Kami menyadari walaupun telah diupayakan secara maksimal namun publikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang. Semoga publikasi ini dapat membantu memberikan informasi bagi para pengguna data.

Lasusua, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kolaka Utara

SIDIK, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II METODOLOGI.....	5
2.1 Sumber Data	7
2.2 Konsep dan Definisi	7
2.3 Penjelasan Teknis	9
BAB III STATISTIK POLITIK	13
BAB IV STATISTIK KEAMANAN.....	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2021.....	13
Tabel 2. Jumlah Polres, Polsek, dan Pos Polisi, 2019-2021	19
Tabel 3. Jumlah Personel Polisi Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021.....	20
Tabel 4. Nilai Beberapa Indikator Kriminalitas di Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Indikator Tahun 2019–2021	22

<https://kolutkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Kolaka Utara, 2019-2021.....	14
Gambar 2. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD	15
Gambar 3. Gambar 4. Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>), 2021	20
Gambar 4. Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) dan Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>), 2019-2021	21
Gambar 5. Jumlah Kejadian Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan, 2021 (Persen)	23
Gambar 6. Jumlah Kejadian Kejahatan Menurut Kelompok Kejahatan dan Jenis Kelamin, 2021.....	24



BAB I PENDAHULUAN

<https://kollabapps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya politik mempengaruhi keamanan, atau situasi keamanan melahirkan ide-ide kebijakan politik. Karena perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis, maka diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan. Sehingga perlu adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu di dalam sebuah wilayah.

Melalui publikasi ini diharapkan terkumpul data tentang situasi politik dan keamanan. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan.

1.2 Tujuan

Penulisan Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Kolaka Utara 2020 ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan data mengenai perkembangan kondisi politik dan keamanan di Kabupaten Kolaka Utara secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang politik, keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

1.3 Ruang Lingkup

Publikasi ini mencakup data-data yang terkait dengan keadaan politik dan keamanan di Kabupaten Kolaka Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini tersusun dalam 4 (empat) bab dan ditambah dengan lampiran yang berisikan tabel dan kuesioner, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II METODOLOGI, meliputi sumber data dan konsep dan definisi

BAB III STATISTIK POLITIK

BAB IV STATISTIK KEAMANAN

<https://kolutkab.bps.go.id>



BAB II METODOLOGI

<https://kollidabooks.go.id>



BAB II

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Kabupaten Kolaka Utara ini bersumber dari hasil kegiatan pengumpulan data Statistik Politik dan Keamanan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kolaka Utara. Narasumber terdiri dari instansi terkait, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kolaka Utara, dan POLRES Kabupaten Kolaka Utara.

2.2 Konsep dan Definisi

STATISTIK POLITIK

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

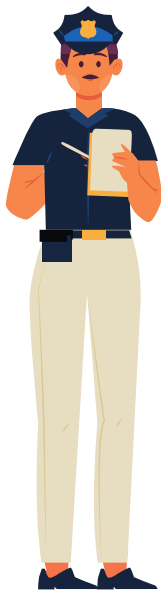


Partisipasi Penduduk dalam Pemilu adalah penduduk yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Angka partisipasi adalah persentase pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

STATISTIK KEAMANAN

Tindak Kejahatan (Kriminalitas) atau Pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.



Peristiwa yang Dilaporkan adalah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polisi, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian adalah:

- a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
- b. Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
- c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh Kepolisian berdasarkan asas plichtmatigheid.
- d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian
- e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
- f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku Kejahatan adalah:

- a. Orang yang melakukan kejahatan.
- b. Orang yang turut melakukan kejahatan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- d. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- e. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

2.3 Penjelasan Teknis

Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang dilaporkan kepada polisi yang terjadi pada kurun tertentu. Pada sumber data kepolisisan, jumlah tindak kejahatan adalah merupakan jumlah tindak kejahatan adalah peristiwa yang dilaporkan yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisisan dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi.



Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Crime Clearance*) merupakan persentase penyelesaian tindak kejahatan oleh polisi. Angka penyelesaian tindak kejahatan merupakan perbandingan jumlah tindak kejahatan yang dapat diselesaikan oleh pihak kepolisisan dengan tindak kejahatan yang dilaporkan pada kurun waktu tertentu. Angka ini dihitung menggunakan rumus: Semakin tinggi berarti kinerja polisi semakin baik dalam menangani kasus.

Persentase Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Clearance Rate*) merupakan statistik yang menyatakan persentase penyelesaian tindak pidana oleh polisi atau persentase jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan terhadap jumlah peristiwa yang dilaporkan. Angka ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\text{Penyelesaian tindak pidana oleh polisi}}{\text{Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$$

Angka Kejahatan (*Crime Rate*) atau Risiko Terkena Kejahatan adalah jumlah kejahatan setahun dibagi dengan jumlah penduduk tahun ybs dikalikan 100.000. Semakin tinggi angka kejahatan berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah. Angka ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

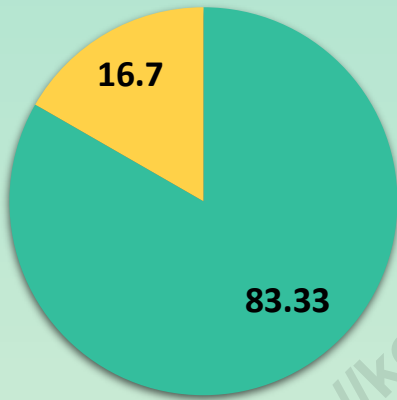
$$\frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

<https://kolutkab.bps.go.id>

BAB III

STATISTIK POLITIK

KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD



■ Laki-laki ■ Perempuan

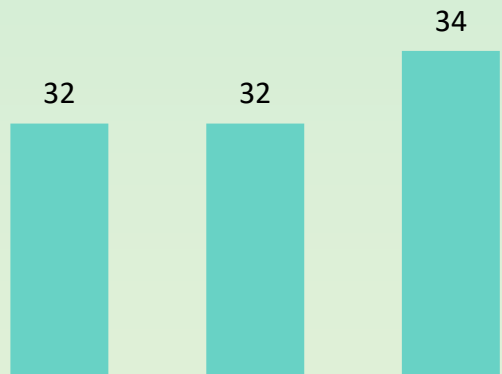


Sebanyak **16,7** persen anggota DPRD adalah perempuan

JUMLAH ORMAS/LSM



Di tahun 2021 terdapat 2 Ormas/LSM yang mendaftar. Sehingga jumlah Ormas/LSM adalah **34** di tahun 2021.



2019

2020

2021

BAB III

STATISTIK POLITIK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pemerintah pusat terus mendorong agar perempuan dapat memenuhi keterwakilannya di Lembaga legislatif paling rendah sebesar 30 persen. Berdasarkan hasil Pemilu legislatif 2019, jumlah anggota parlemen tersaji dalam Tabel 1. Dari seluruh partai, terdapat **25** orang anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara, dimana **5** orang diantaranya adalah perempuan. Keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif Kabupaten Kolaka Utara adalah sebesar 20 persen.

Tabel 1. Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Berdasarkan Partai Politik dan Jenis Kelamin, 2021

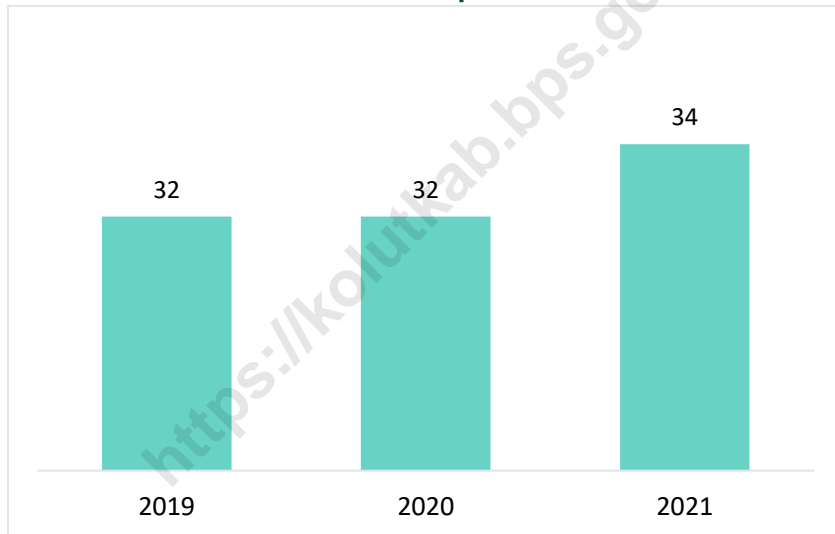
Asal Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	0	3
Demokrat	6	2	8
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3	2	5
Gerindra	2	0	2
Golkar	1	0	1
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3	0	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	2	1	3
Jumlah	20	5	25

Sumber : Statistik Politik dan Keamanan 2022

Jika dilihat berdasarkan partai politik, keterwakilan perempuan ada di dalam partai Demokrat yaitu sebanyak 25 persen, partai Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 40 persen, dan Partai Bulan Bintang (PBB) sebanyak 33 persen. Selain itu, di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan (PBB) tidak terdapat keterwakilan perempuan atau 100 persen anggota DPRD dari partai politik tersebut adalah laki-laki.

Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasikan kepentingan tertentu. Melalui organisasi masyarakat diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Di wilayah Kabupaten Kolaka Utara jumlah total Ormas/LSM yang terdaftar dari tahun 2019 - 2021 cenderung meningkat, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak kelompok yang berusaha untuk merepresentasikan kepentingan mereka agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Grafik berikut menyajikan jumlah ormas dan LSM yang terdaftar di Kabupaten Kolaka Utara dalam kurun waktu tahun 2019-2021.

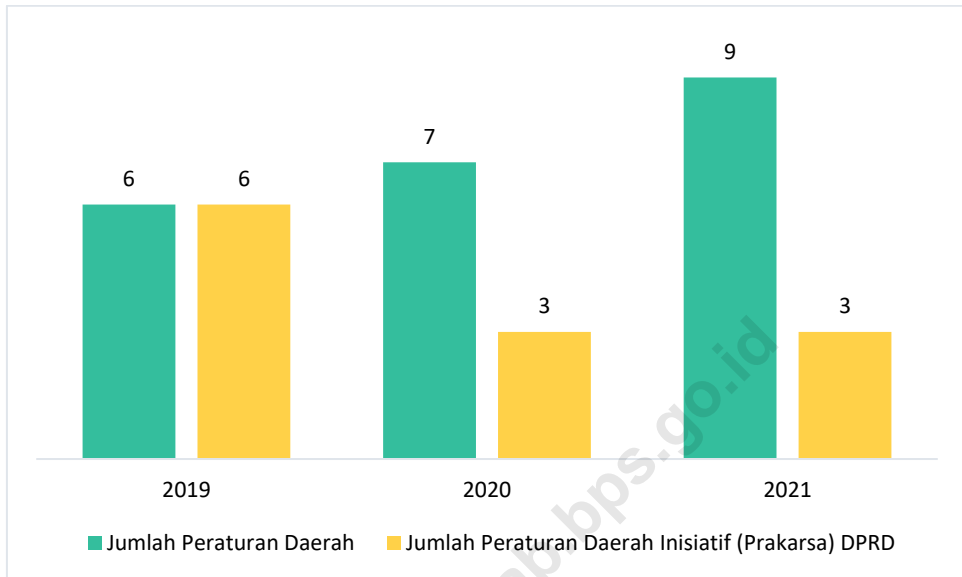
Gambar 1. Jumlah Ormas/LSM Kabupaten Kolaka Utara, 2019-2021



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Pada tahun 2019 terdapat 6 Ormas/LSM yang mendaftar, sehingga jumlah total Ormas/LSM yang terdaftar adalah sebanyak 32 Ormas/LSM. Pada tahun 2020 tidak ada Ormas/LSM yang mendaftar sehingga jumlah total Ormas/LSM yang terdaftar sama seperti tahun 2019 yaitu sebanyak 32 Ormas/LSM. Di tahun 2021 terdapat 2 Ormas/LSM yang mendaftar, sehingga jumlah total Ormas/LSM yang terdaftar adalah sebanyak 34 Ormas/LSM.

Gambar 2. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Peraturan Daerah yang efektif dan efisien akan menciptakan ketentraman hidup masyarakat karena bersifat melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib daerah. Banyaknya jumlah peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah peraturan daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2018 sebanyak 12 perda, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 6 perda dan tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7 perda. Jika dilihat dari jumlah perda inisiatif Kabupaten Kolaka Utara jumlah perda inisiatif (prakarsa) adalah sebanyak 3 perda inisiatif, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6 perda inisiatif (prakarsa), dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 6 perda inisiatif.

BAB IV

STATISTIK KEAMANAN



Jumlah Kantor Polisi

**POLRES 1
POLSEK 7**

Jumlah Personel Polisi

268



8



Crime Clearance

91.08%

Sebanyak 91,08 persen kejahatan berhasil diselesaikan dari seluruh kejahatan yang dilaporkan



BAB IV

STATISTIK KEAMANAN

Polisi memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, disusun organisasi POLRI secara berjenjang dari tingkat pusat hingga kecamatan. Organisasi POLRI di tingkat Kabupaten adalah Polres dan di tingkat Kecamatan adalah Polsek. Berikut adalah jumlah Polres, Polsek, dan Pos Polisi di Kabupaten Kolaka Utara dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2021.

Tabel 2. Jumlah Polres, Polsek, dan Pos Polisi, 2019-2021

Jumlah	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)
Polres/Polresta	1	1	1
Polsek/Polsekta	7	7	7
Pos Polisi	1	1	0

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Berdasarkan Tabel 2., dapat dilihat jika pada tahun 2021 jumlah polres di Kabupaten Kolaka Utara adalah sebanyak 1 dan jumlah polsek adalah sebanyak 7. Selanjutnya pada Tabel 3., dapat dilihat jumlah personel polisi menurut jenis kelamin. Secara umum, jumlah personel polisi mengalami penurunan dari tahun 2019 yang semula berjumlah 282 personel polisi menjadi 276 personel polisi pada tahun 2020. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, personel laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan dengan personel polisi perempuan. Di tahun 2021, dari 276 personel polisi, 268 diantaranya adalah personel polisi laki-laki dan 8 lainnya adalah personel polisi perempuan.

Tabel 3. Jumlah Personel Polisi Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021

Jumlah Personel Polisi	2019	2020	2021
	(1)	(2)	(3)
Laki-laki	272	267	268
Perempuan	9	9	8
Total	281	276	276

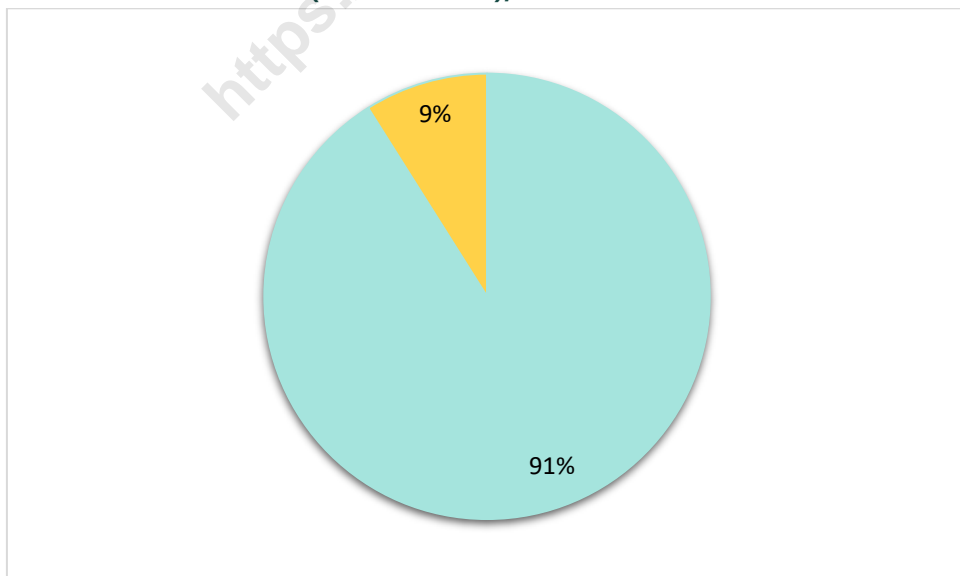
Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Indikator Kriminalitas di Kabupaten Kolaka Utara



Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*), dan jumlah orang yang beresiko mengalami tindak kejahatan (*crime rate*).

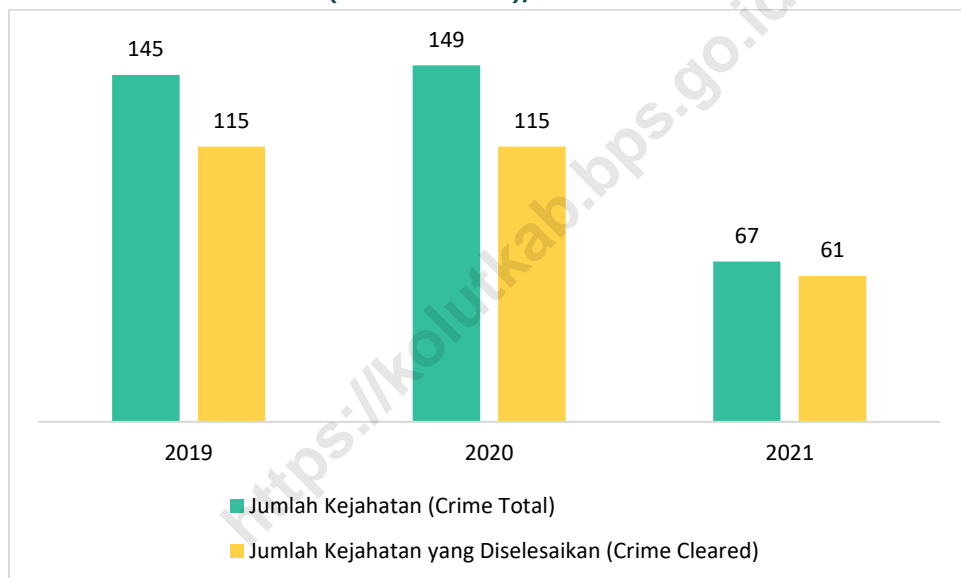
Gambar 3. Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*), 2021



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Jumlah kejahatan (*crime total*) di Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021 67 kasus dan jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*) adalah sebesar 61 kasus atau 91 persen. dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 149 kasus. Jumlah kejahatan yang diselesaikan (*crime cleared*) pada tahun 2018 adalah sebanyak 35 kasus dan di tahun 2019 dan 2020 jumlah kejahatan yang diselesaikan sama yaitu sebanyak 115 kasus.

Gambar 4. Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) dan Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*), 2019-2021



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 4. Nilai Indikator Kriminalitas di Kabupaten Kolaka Utara Menurut Jenis Indikator Tahun 2019 – 2021

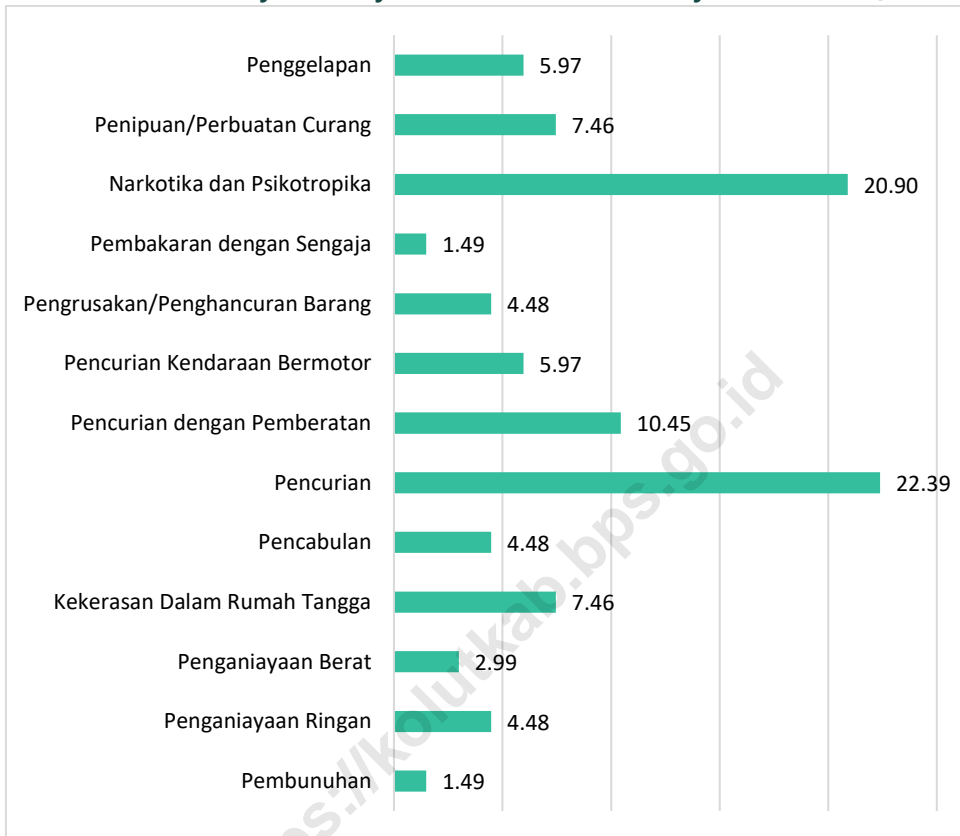
Jenis Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	145	149	67
Jumlah Kejahatan yang diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	115	115	61
Persentase Penyelesaian Tingkat Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	79,31%	77,18%	91,04%
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 penduduk (<i>Crime Rate</i>)	0,001	0,0011	0,00048

Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Tabel 4. menyajikan ringkasan indikator kejahatan selama periode 2019 – 2021. Berdasarkan persentase kejahatan yang diselesaikan, pada tahun 2019 sebanyak 79,31 persen jumlah kejahatan yang selesai dibandingkan dengan jumlah kejahatan keseluruhan. Persentase ini menurun di tahun 2020 menjadi 77,18 persen dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi 91,04 persen.

Jika dilihat dari risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), pada tahun 2019 *crime rate* adalah sebesar 0,001. Artinya sebanyak 100 penduduk dari setiap 100.000 penduduk berisiko untuk terkena tindak kejahatan. Pada tahun 2020 *crime rate* adalah sebesar 0,0011. Artinya, sebanyak 110 penduduk dari setiap 100.000 penduduk berisiko untuk terkena tindak kejahatan. Selanjutnya pada tahun 2021 *crime rate* adalah sebesar 0,00048. Artinya, sebanyak 48 penduduk dari setiap 100.000 penduduk berisiko untuk terkena tindak kejahatan.

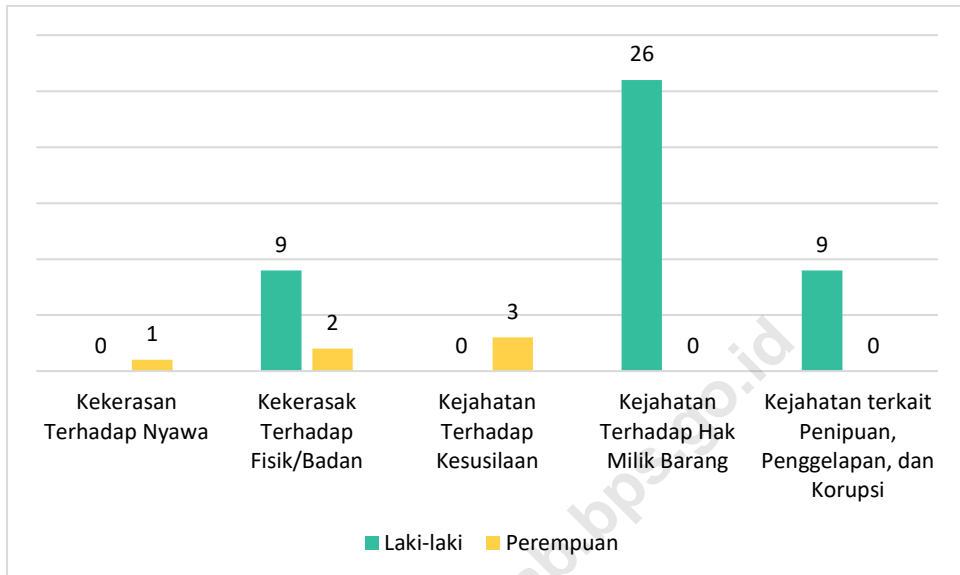
Gambar 5. Jumlah Kejadian Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan, 2021 (Persen)



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Berdasarkan Gambar 5, pada tahun 2021 kejahatan pencurian adalah kejahatan yang paling sering dilaporkan, yaitu sebanyak 22,39 persen. Selanjutnya adalah narkoba dan psicotropika sebanyak 20,90 persen laporan, dilanjutkan kejahatan pencurian dengan pemberatan, yaitu sebanyak 10,45 persen. Kejadian kejahatan lain dilaporkan kurang dari 10 persen.

Gambar 6. Jumlah Korban Kejahatan Menurut Kelompok Kejahatan dan Jenis Kelamin, 2021



Sumber: Statistik Politik dan Keamanan 2022

Jika dilihat berdasarkan kelompok kejahatan dan jenis kelamin, korban kejahatan mayoritas adalah laki-laki. Korban kejahatan laki-laki paling banyak yaitu pada kejahatan hak milik/barang yang berjumlah 26 korban, selanjutnya adalah korban kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi, dan kekerasan terhadap fisik/badan sebanyak 7 orang. Untuk korban kejahatan perempuan paling banyak adalah korban kejahatan terhadap kesusilaan sebanyak 3 orang, kekerasan terhadap fisik/badan sebanyak 2 orang, dan kekerasan terhadap nyawa sebanyak 1 orang.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

Jalan Protokol Poros DPRD Lasusua 93553

Email : bps7408@bps.go.id

Website : kolutkab.bps.go.id

Telepon : (0405)2330029